

# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Sabtu-Senin, 12-14 Januari 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

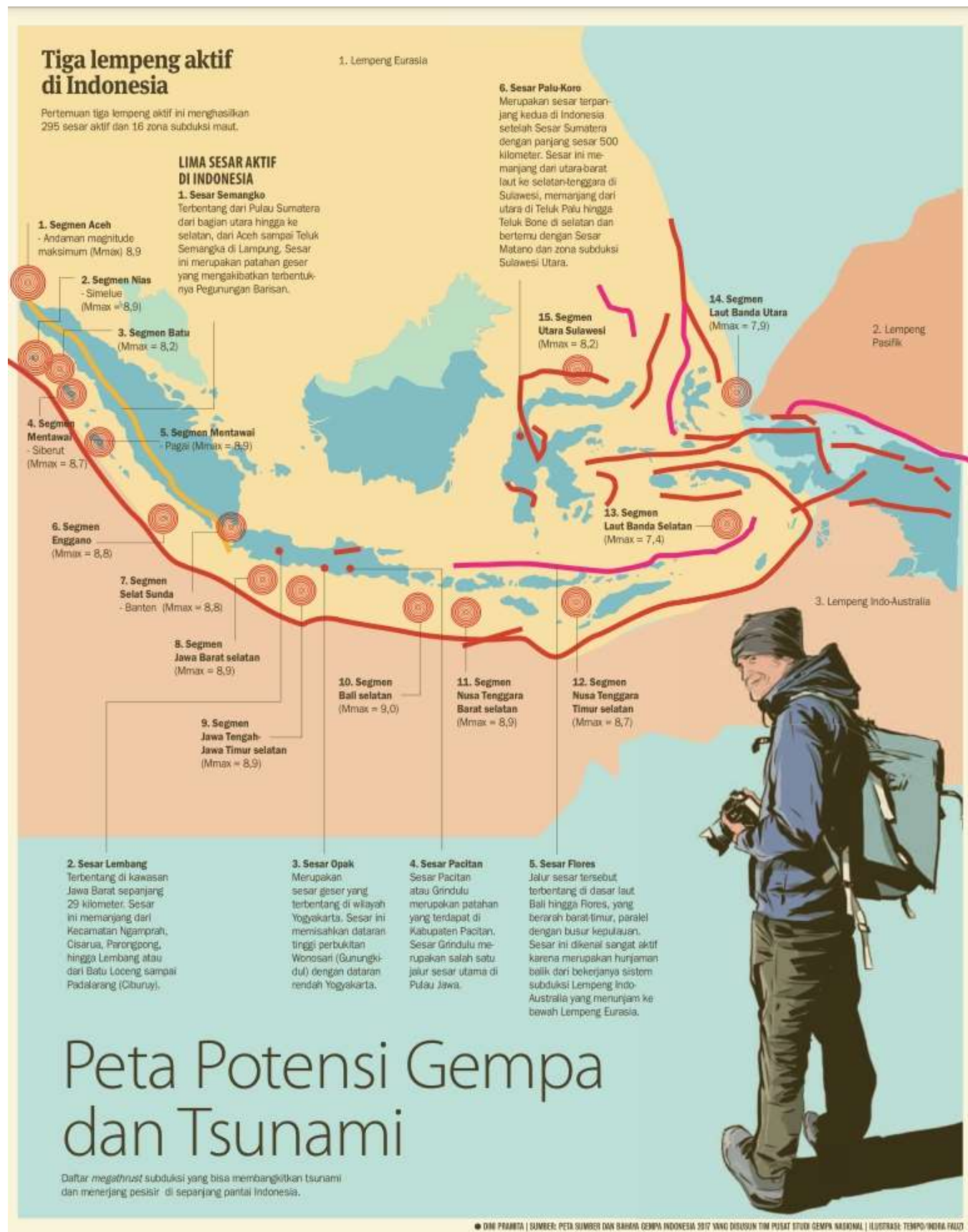
Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

| No | Media                              | Tanggal                         | News Title                                | Resume                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Koran Tempo<br>(Halaman, 13)       | Akhir Pekan, 12-13 Januari 2019 | Info Grafis                               | Peta potensi gempa dan tsunami di Indonesia                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Kompas<br>(Halaman, 1)             | Minggu, 13 Januari 2019         | Momentum Menata Pesisir Selat Sunda       | Ancaman tsunami di pesisir Selat Sunda harus diantisipasi. Pelibatan masyarakat dalam penataan juga sebaiknya dilakukan demi meminimalkan risiko                                                                                               |
| 3  | Kompas<br>(Halaman, 17)            | Sabtu, 12 Januari 2019          | Tambah Tukang untuk Percepat Hunian Tetap | Pembangunan hunian tetap bagi korban gempa Lombok jauh dari target. Kendala utama adalah kekurangan tukang bangunan. Tak mudah mendapat tukang. Banyak daerah perlu untuk membangun hunian                                                     |
| 4  | Kompas<br>(Halaman, 1)             | Senin, 14 Januari 2019          | Kota Cerdas Hadirkan Solusi Masalah Warga | Interaksi antarwarga dan warga dengan pengelola kota, tak tergantikan oleh perangkat teknologi. Manusia tetap menjadi pusat pembangunan                                                                                                        |
| 5  | Kompas<br>(Halaman, 16)            | Senin, 14 Januari 2019          | Kota-kota yang Terus Belajar              | Kemajuan kota dan kesejahteraan turut bergantung pada kemampuan pemimpin kota. Kota modern saja belumlah cukup untuk disebut sebagai kota cerdas                                                                                               |
| 6  | Kompas<br>(Halaman, 17)            | Senin, 14 Januari 2019          | Pemulihan Lampung Selatan                 | Pemulihan sektor pariwisata di Lampung Selatan setelah tsunami Selat Sunda perlu dukungan dari pemerintah. Zona merah rawan bencana juga perlu diperhatikan                                                                                    |
| 7  | Kompas<br>(Halaman, 18)            | Senin, 14 Januari 2019          | Pemda Akomodasi Pendataan Susulan         | Meskipun data bencana tingkat Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota terus membuka kesempatan bagi penyitas menyusulkan data yang belum tercakup, baik anggota keluarganya yang tewas maupun rumahnya yang rusak |
| 8  | Kompas<br>(Halaman, 19)            | Senin, 14 Januari 2019          | Langkah Awal Kota Cerdas                  | Mulai mengurangi sampah, kendati masih banyak pekerjaan lain                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 3)  | Senin, 14 Januari 2019          | 6 Ruas Siap Dilelang                      | Panjang enam ruas tol ini mencapai 391,73 KM dan diperkirakan akan menelan investasi sebesar Rp 131,73 triliun                                                                                                                                 |
| 10 | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 7)  | Senin, 14 Januari 2019          | Pengembalian LMAN Capai 84,36%            | Lembaga Manajemen Aset Negara telah merealisasikan pembayaran dana talangan proyek strategis jalan nasional tol kepada badan usaha sebesar 84,36% dari tagihan yang diajukan                                                                   |
| 11 | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 17) | Senin, 14 Januari 2019          | Bendungan Bedo Rampung Akhir Tahun Ini    | Bendungan Bedo yang berlokasi di Ponorogo memiliki tinggi 17 M, lebar puncak 15 M dan panjang 332 M itu ditargetkan selesai pada akhir tahu ini                                                                                                |
| 12 | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 17) | Senin, 14 Januari 2019          | Inkindo Ingin Remunerasi Minimal Merata   | Kalangan konsultan mendesak penerapan remunerasi minimal pada jasa konsultasi di seluruh instansi pemilik proyek                                                                                                                               |
| 13 | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 8)  | Senin, 14 Januari 2019          | Sudahi Petaka Di Lintas Sumatra           | Lalu lintas truk pengangkut batu bara meninggalkan cerita kelam. Pergerakan orang dan barang tersendat, criminal meningkat dan ratusan nyawa melayang                                                                                          |
| 14 | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 8)  | Senin, 14 Januari 2019          | Utamakan Jalan Khusus                     | Untuk angkutan berat batu bara                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 8)  | Senin, 14 Januari 2019          | Jalan Tol Patimban Bisa Dibiayai JICA     | Konsorsium yang menjadi pemrakarsa jalan tol akses Patimban melancir peluang pendanaan proyek                                                                                                                                                  |
| 16 | Bisnis Indonesia,<br>(Halaman, 8)  | Senin, 14 Januari 2019          | Berita Foto                               | Menteri Pertanian menyerahkan bantuan 96 unit mesin tetas kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya                                                                                                          |

|        |                                             |         |                                 |
|--------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Judul  | Info Grafis                                 | Tanggal | Akhir Pekan, 12-13 Januari 2019 |
| Media  | Koran Tempo (Halaman, 13)                   |         |                                 |
| Resume | Peta potensi gempa dan tsunami di Indonesia |         |                                 |





|        |                                                                                                                                                  |         |                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Judul  | <b>Momentum Menata Pesisir Selat Sunda</b>                                                                                                       | Tanggal | Minggu, 13 Januari 2019 |
| Media  | Kompas (Halaman, 1)                                                                                                                              |         |                         |
| Resume | Ancaman tsunami di pesisir Selat Sunda harus diantisipasi. Pelibatan masyarakat dalam penataan juga sebaiknya dilakukan demi meminimalkan risiko |         |                         |

# Momentum Menata Pesisir Selat Sunda

Ancaman tsunami di pesisir Selat Sunda harus diantisipasi. Pelibatan masyarakat dalam penataan juga sebaiknya dilakukan demi meminimalkan risiko.

**LABUAN, KOMPAS** — Tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 menjadi momentum penataan kembali kawasan ini. Ancaman tsunami dinilai masih sangat tinggi, terutama yang dipicu aktivitas dari zona *megathrust* Selat Sunda.

Ancaman tsunami dari Anak Krakatau masih ada, tetapi tidak akan sebesar tsunami yang dipicu gempa *megathrust* atau seperti saat letusan Gunung Krakatau pada 1883.

"Melihat ancamannya, kita harus menyiapkan diri lebih baik. Harus ada penataan kawasan wisata dan industri, juga pelibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dalam pertemuan dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita, di Tanjung Lesung, Sabtu (12/1/2019).

Pertemuan juga dihadiri Kepala Badan Meteorologi, Klima-

tologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kasbani, serta beberapa pakar gempa dan tsunami. Doni juga menemui kalangan industri kimia di Candra Asri, Cilegon, yang berada di zona rawan tsunami.

Doni juga mengharapkan peran tokoh masyarakat, khususnya ulama, di Banten. "Ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Misalnya, kalau ada *buoy* tsunami, jangan diambil. Ini mata dan telinga kita, seperti pos tinjau dalam mekanisme pertempuran. Ini obyek vital nasional kita," tuturnya.

## Bangunan evakuasi

Dalam pertemuan itu, Irna menanyakan penyebab tsunami. "Sampai sekarang BMKG masih menyatakan waspada tsunami, sementara Badan Geologi menyatakan sudah aman. Penyebabnya juga masih beda,"

kata Irna.

Ia juga mengeluhkan keberadaan bangunan evakuasi tsunami di Labuhan yang tak terawat sehingga tidak terpakai.

"Bangunan evakuasi ini juga tidak cukup. Ada dua kecamatan di tepi pantai yang landai dan jumlah penduduknya 35.000 jiwa. Kami akan merevisi rencana tata ruang wilayah, tetapi untuk relokasi masyarakat di pesisir akan sulit karena mereka sudah lama tinggal di sana. Jadi, butuh lebih banyak bukit-bukit buatan dan tsunami shelter," kata Irna.

Peneliti tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdul Muhari, mengatakan, dari surveinya, ada beberapa permukiman yang selamat dari tsunami karena terlindung tanaman pesisir.

Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Wijaja pun mengatakan, risiko

(Bersambung ke hlm 11 kol 1-4)



|        |                                                                                                                                                                                            |         |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Tambah Tukang untuk Percepat Hunian Tetap</b>                                                                                                                                           | Tanggal | Sabtu, 12 Januari 2019 |
| Media  | Kompas (Halaman, 17)                                                                                                                                                                       |         |                        |
| Resume | Pembangunan hunian tetap bagi korban gempa Lombok jauh dari target. Kendala utama adalah kekurangan tukang bangunan. Tak mudah mendapat tukang. Banyak daerah perlu untuk membangun hunian |         |                        |

# Tambah Tukang untuk Percepat Hunian Tetap

Pembangunan hunian tetap bagi korban gempa Lombok jauh dari target. Kendala utama adalah kekurangan tukang bangunan. Tak mudah mendapat tukang. Banyak daerah perlu untuk membangun hunian.

**MATARAM, KOMPAS** — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat semestinya menambah jumlah tukang atau pekerja bangunan. Banyaknya rumah rusak berat memerlukan tukang bangunan lebih banyak untuk mempercepat pembangunan hunian tetap warga korban gempa Lombok, Juli-Agustus 2018.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Muhammad Rum mengatakan, Jumat (11/1/2019), di Mataram, persoalan mendasak saat ini adalah ketersediaan tukang untuk membangun hunian tetap (hunatap), yakni rumah instan konvensional (riko) dan rumah instan kayu (rika). Idealnya, satu unit riko dan rika perlu dua tukang dan empat peladen (pembantu tukang), tetapi realitas di lapangan berbeda. "Kemarin saya lihat, pembangunan satu rumah dikerjakan sendiri. Tentu lama selesainya," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemprov NTB dipimpin Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, Jumat, dibahas penambahan 751 fasilitator guna memperkuat 351 fasilitator saat ini untuk mempercepat pembangunan hunatap. Berdasarkan data BPBD NTB, jumlah rumah rusak berat 75.138 unit.

Menurut Rum, penambahan fasilitator sebaiknya diikuti penambahan jumlah tukang bangunan. Tugas fasilitator antara lain mendampingi masyarakat, membuat rencana anggaran biaya hunatap, membuat desain teknis, serta mencari aplikasi (penyedia bahan bangunan) dan kontraktor bangunan bagi kelompok masyarakat.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB IGB Sugiharta, Jumat pa-



KOMPAS/ETHAERUL ANWAR

**Hunian sementara** di Desa Sajang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, menjadi pilihan tempat berteduh bagi korban gempa Lombok, Juli-Agustus 2018, saat ini. Namun, korban gempa tetap berharap bisa membangun kembali rumah mereka yang roboh sebagai hunian tetap.

gi, menyatakan pesimistis rehabilitasi-rekonstruksi rumah selesai sesuai target, Maret 2019.

Saat ini baru 120 hunatap terbangun, jauh dari total rumah rusak berat yang tersebar di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Adapun pembangunan rumah rusak sedang baru 4.000 unit dari 33.075 rumah rusak sedang.

Menurut Sugiharta, jumlah pekerja jadi kendala utama. Tidak mudah mendapat tukang karena beberapa kabupaten lain juga perlu tukang bangunan.

## Relokasi

Dari Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan, lahan relokasi bagi penyintas longsor di Kampung Garehong, Desa Sirnaresmi,

Cisolok, ditargetkan ditetapkan tahun ini. Sembari menunggu kepastian, Pemkab Sukabumi akan membangun hunian sementara (hunantara).

"Jika sudah dapat rekomendasi daerah yang tepat dari para ahli, kami akan langsung membangun hunian tetap. Sementara itu, kami akan membangun hunantara di Desa Sirnaresmi," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri di Garehong, Jumat.

Iyos ke lokasi bencana mendampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Doni Monardo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwikorita Karnawati, dan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kasbani.

Kasbani menyatakan, lokasi longsor tak direkomendasikan untuk lahan permukiman ataupun pertanian. "Kemiringan tanah lebih dari 40 derajat berbahaya untuk dijadikan lahan pertanian," ujarnya.

Menurut Dwikorita, curah hujan tinggi diprediksi berlangsung hingga Maret. Warga tidak disarankan beraktivitas di lokasi longsor karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan.

Doni mengatakan, perlu ditingkatkan sinergitas antarlembaga terkait mitigasi bencana. Setiap instansi yang memiliki kemampuan analisis kebencanaan diharapkan mampu memberikan rekomendasi sehingga pihaknya mampu melakukan tanggap bencana dengan tepat.

(RUL/RTG)



|        |                                                                                                                                         |         |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Kota Cerdas Hadirkan Solusi Masalah Warga</b>                                                                                        | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Kompas (Halaman, 1)                                                                                                                     |         |                        |
| Resume | Interaksi antarwarga dan warga dengan pengelola kota, tak tergantikan oleh perangkat teknologi. Manusia tetap menjadi pusat pembangunan |         |                        |

# Kota Cerdas Hadirkan Solusi Masalah Warga

Interaksi antarwarga, dan warga dengan pengelola kota, tak tergantikan oleh perangkat teknologi. Manusia tetap menjadi pusat pembangunan.

## Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018



### Skor Dimensi Masyarakat pada Kota Pemenang IKCI 2018

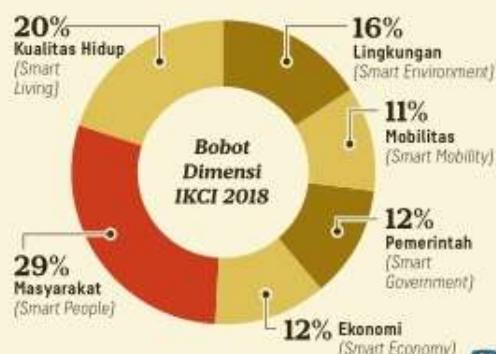
| Metropolitan<br>Surabaya | Besar<br>Denpasar | Sedang<br>Manado | Kecil<br>Padang Panjang |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 17,12                    | 15,71             | 15,28            | 14,23                   |
| 1,85                     | 2,58              | 2,04             | 1,95                    |
| 1,53                     | 2,13              | 1,69             | 1,62                    |
| 4,16                     | 5,79              | 4,60             | 4,39                    |

● Dimensi: Subdimensi, Indikator, dan Subindikator ● Masyarakat ● Inklusivitas Sosial ● Pendidikan ● Kreativitas

### Perbedaan IKCI 2015 dan 2018

| 2015                                                                                                                                                                       | Sumber Data                    | 2018                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data sekunder (BPS dan institusi lainnya) dan pendapat masyarakat                                                                                                          |                                | Data sekunder (BPS dan institusi lainnya) dan penilaian dari para pakar terkait kota cerdas                                                                                                                                                                     |
| <b>3 Dimensi:</b> Ekonomi, Masyarakat, dan Lingkungan<br><b>3 katalisator:</b> TK, Tata Kelola, dan SDM                                                                    | <b>Dimensi</b>                 | <b>6 Dimensi:</b> Ekonomi, Masyarakat, Lingkungan, Mobilitas, Kualitas Hidup, dan Pemerintahan                                                                                                                                                                  |
| ..... <b>12 Subdimensi</b>                                                                                                                                                 | <b>Sub Dimensi</b>             | <b>18 Subdimensi</b> .....                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3 Kategori:</b><br>• Kota Besar: penduduk lebih dari 1 juta jiwa<br>• Kota Sedang: penduduk 200.000 jiwa-1 juta jiwa<br>• Kota Kecil: penduduk kurang dari 200.000 jiwa | <b>Pembagian Kategori Kota</b> | <b>4 Kategori</b> berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007<br>• Kota Metropolitan: penduduk minimal 1 juta jiwa<br>• Kota Besar: penduduk 500.000 jiwa-1 juta jiwa<br>• Kota Sedang: penduduk 100.000-500.000 jiwa<br>• Kota Kecil: berpenduduk maksimal 100.000 jiwa |

### Penduduk Perkotaan Meningkat (Juta Jiwa)



Sumber: LSI/SGA/Ustaz Arpan, data dari BPS.

FOTO: PUTA BOWI ARYANTO / SUGROHO / IWAN SETIYAN, INFOGRAPHIC: HILMAS

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas hidup warga kota menjadi pencapaian paripurna kota cerdas, sesuai dengan definisi yang dikembangkan lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018. Definisi itu mengacu pada model lingkaran kota cerdas Boyd Cohen, pegiat kota cerdas internasional.

Itu pula metode penilaian dan pembobotan kota dalam IKCI 2018, yang menempatkan empat kota pada urutan pertama di setiap kategori. Keempatnya adalah Kota Surabaya



SACA JUGA **HLM 16 & 19**

untuk Kota Metropolitan, Kota Denpasar untuk Kota Besar, Kota Manado untuk Kota Sedang, dan Kota Padang Panjang untuk Kota Kecil. Penyusunan

(Bersambung ke hlm 11 kol 3-5)

[klik.kompas.id/cerlassby](http://klik.kompas.id/cerlassby)



# Kota Cerdas Hadirkan Solusi Masalah

(Sambungan dari halaman 1)

indeks 93 kota otonom itu mengacu pada sejumlah parameter Cohen.

Ada enam dimensi cerdas yang dinilai, yakni lingkungan, masyarakat, ekonomi, kualitas hidup, pemerintahan, dan mobilitas. Keenamnya diturunkan menjadi 18 subdimensi, 26 indikator, dan 71 subindikator. Pembobotan tertinggi ada pada dimensi masyarakat cerdas.

Secara sosiologis, tidak ada kecerdasan sempurna pada sebuah kota. "Yang cerdas masyarakatnya, bukan kotanya," kata sosiolog Universitas Indonesia, Daisy Indira Yasmine, yang juga juri IKCI 2018, akhir pekan lalu. Rabu (9/1/2019), 12 kota menerima penghargaan dari *Kompas* atas capaian sebagai kota cerdas.

Secerdas-cerdasnya kota, kata Daisy, semangat kebersamaan tidak boleh dilupakan. Roh kota cerdas bukan pada seberapa gampang dan masifnya koneksi internet, penerapan berbagai aplikasi, dan aneka platform berbasis digital. "Gunakanlah teknologi informasi untuk membangun semangat komunitas. Kebersamaan adalah modal utama pembangunan," katanya. Tanpa kebersamaan, pembangunan kota tidak akan benar-benar memberi solusi atas kebutuhan para penghuninya.

Soal solusi inilah yang penting untuk keberlanjutan kota dan penghuninya. Sehebat-hebatnya program dan kebijakan, selama tidak menjawab kebutuhan atau jalan keluar masalah warganya, maka belum bisa disebut sebagai wujud pembangunan yang cerdas.

Oleh karena itu, penilai utama sebuah kecerdasan kota adalah warga. Merekalah yang benar-benar merasakan dampak kebijakan atau program pengelola kota.

Seiring zaman yang cepat berubah, daerah dituntut pula

cepat beradaptasi. "Selalu ada tantangan-tantangan baru, daerah dituntut punya perencanaan pembangunan yang matang," kata Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah Institut Teknologi Bandung Ridwan Sutriadi.

Kematangan perencanaan kota dan wilayah itu antara lain harus diiringi pengembangan inovasi teknologi. Itu semua ditempuh untuk memecahkan persoalan warga kota.

## Keterlibatan warga

Unsur penting kota cerdas adalah interaksi antarwarga, dan warga dengan pengelola kota. "Kami selalu menggandeng komunitas untuk memastikan program berlanjut," kata Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.

Komunitas digandeng demi kebersihan lingkungan, seperti sungai, kegiatan kebudayaan, hingga ekonomi kreatif, semisal Festival Denpasar, yang juga memberi ruang berkembang dan mandiri bagi para difabel.

Penyediaan ruang kreativitas dan ekspresi warga di kota multikultur itu menunjukkan komitmen pemkot mengembangkan ekonomi daerah dan warga berbasis pengetahuan dan kearifan lokal. "Denpasar Festival juga jadi wahana menggali budaya dan mengenalkannya kepada masyarakat sebagai upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan," kata dosen ekonomi Universitas Udayana, I Gusti Wayan Murjana Yasa.

Di Padang Panjang, dampak pembangunan kota juga dirasakan warga. Selain koneksi internet di tempat publik, jalan-jalan sampai gang-gang kecil juga bagus. "Dulu, jalan-jalan di kota ini buruk. Sekarang, pusat kota juga mulai ditata baik. Tersedia juga jalur bagi pejalan kaki," kata tokoh masyarakat Padang Panjang Barat, Syamsul Bahri (67).

Kota itu juga menjadi tujuan para perantau lokal yang hen-

dak belajar agama di sejumlah pondok pesantren, hingga belajar seni budaya di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

Di kota berpenduduk 53.000 jiwa itu tersedia ruang terbuka hijau dan pusat kegiatan kebudayaan, seperti area depan Gedung M Syafei. Di sana, setiap Jumat sore hingga malam, komunitas-komunitas bergiliran tampil untuk berekspresi.

"Tahun ini kami akan bangun ruang kendali (*command center*)," kata Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran. Fasilitas itu untuk menyempurnakan layanan kepada warga kota tempat tumbuhnya tokoh nasional Buya Hamka dan pahlawan nasional HR Rasuna Said itu.

Adapun Kota Surabaya enam tahun terakhir bermetamorfosis dari kota kotor, kumuh, dan tidak aman menjadi kota taman, rapi, dan nyaman bagi warganya. "Tempat pembuangan sampah tidak bau meski dekat sekali dengan rumah warga karena setiap hari diangkut petugas," ucap Yurika (32), warga Wonokromo.

Melalui layanan Command Center 112, warga yang menghadapi masalah, seperti kebakaran, kriminalitas, dan kecelakaan, bisa mencari bantuan melalui gawai.

Ada lebih dari 1.000 kamera pemantau yang membantu mengawasi kota seluas 315 kilometer persegi ini. "Teknologi membuat pelayanan publik makin berdampak dan mudah diakses," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Layanan publik terpadu juga diterapkan di Manado, sejak awal 2017, setelah fokus pada sejumlah perbaikan birokrasi. Layanan itu dinamai Cerdas Command Center (C3). "Kami dapat terus memonitor situasi kota dan merespons keluhan warga dengan cepat," kata Wali Kota Manado Vicky Lumentut.

(NIA/BOW/TAN/E07/COK/  
ZAK/ETA/SYA/GSA)



|        |                                                                                                                                                  |         |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Kota-kota yang Terus Belajar</b>                                                                                                              | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Kompas (Halaman, 16)                                                                                                                             |         |                        |
| Resume | Kemajuan kota dan kesejahteraan turut bergantung pada kemampuan pemimpin kota. Kota modern saja belumlah cukup untuk disebut sebagai kota cerdas |         |                        |



KOMPAS/ROY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah wali kota dan perwakilan kota menerima tanda penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018, dan disambut Pemimpin Redaksi Harian *Kompas* Ninuk Mardiana Pambudy (ketiga dari kanan) dan sejumlah pimpinan Kompas Gramedia di Jakarta, Rabu (9/1/2019). Kota Surabaya meraih nilai tertinggi kategori Kota Metropolitan. Peringkat pertama kategori Kota Besar diraih Kota Denpasar, Kota Sedang diraih Kota Manado, dan Kota Kecil diraih Padang Panjang.

# Kota-kota yang Terus Belajar

**Kemajuan kota dan kesejahteraan warga turut bergantung pada kemampuan pemimpin kota. Kota modern saja belumlah cukup untuk disebut sebagai kota cerdas.**

Wali Kota Manado Vicky Lumentut tak ragu mengakui dirinya belajar dari kota dan pemimpin kota lain sehingga memperoleh peringkat pertama kota cerdas untuk kategori kota sedang (>100.000-500.000 penduduk). Ia menyebut Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta.

Belajar dari kota lain memudahkan birokrasi mengetahui apa yang perlu dibenahi. Hasilnya, antara lain, lahirnya layanan terpadu Cerdas Command Center (C3), Februari 2017. Melalui sistem itu, pemerintah kota memonitor situasi kota dan merespons keluhan warga secara cepat.

"Meski kami adopsi dari keempat kota besar itu, kami tetap berinovasi," ujar Vicky saat penyerahan penghargaan In-

deks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018 oleh *Kompas* di Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Belajar pula yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar, penerima penghargaan kota cerdas kategori kota besar (>500.000-1 juta penduduk). Penataan Sungai (Tukad) Bindu, di antaranya, terinspirasi kebersihan Sungai Han di Seoul, ibu kota Korea Selatan.

Bermula tahun 2010, Komunitas Kali Bersih Tukad Bindu menggerakkan bersih-bersih sungai kotor dan suram itu. Dapat pendanaan pemerintah pusat dan dukungan Pemkot Denpasar, Sungai Bindu terus dibenahi.

Bantaran sungai jadi jalur pedestrian dilengkapi peralatan berolahraga dan jembatan dengan aksesoris unik yang menjadi tempat berfoto. Sungai ber-



sih dari sampah plastik atau sampah anorganik.

Itu pula yang membuat Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra percaya kekuatan komunitas. "Tanpa komunitas, pembangunan tidak berlanjut," ujarnya.

Kota cerdas menjadi tempat belajar kota lain ataupun para pendatang untuk menimba ilmu. Kota Padang Panjang, juara kota cerdas kategori kota kecil (<100.000 penduduk), jadi tujuan belajar agama dan seni budaya di ISI Padang Panjang.

"Banyak pendatang belajar di kota kami," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Laswarni.

Kota Surabaya pun sama. Banyak anak muda belajar di kota dengan skor tertinggi kota cerdas kategori Kota Metropolitan (>1 juta penduduk) itu.

Keunggulan sumber daya manusia itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kota. Puluhan penghargaan diperoleh Surabaya dalam enam tahun terakhir. "Kota ini benar-benar jadi rumah warganya sehingga warga turut menjaga kota. Apalagi segala urusan mudah, murah, dan terukur. Bahkan, banyak fasilitas gratis," kata Novianingtyastuti (48), konsul-

tan SDM dan bisnis.

General Manager Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Harian *Kompas* F Harianto Santoso menilai, pemimpin kota sangat memengaruhi kemajuan kota. Di Surabaya, misalnya, Wali Kota Tri Rismaharini adalah *chief executive officer* kota yang tidak sekadar membawa kota kian modern, tetapi juga menyejahterakan masyarakat.

Di tengah kian beragamnya masalah perkotaan, dituntut solusi cerdas para pemimpinnya. Dan, penghargaan IKCI ini diharapkan menginspirasi kota lain. Solusi cerdas berawal dari kemajuan belajar, seperti diakui Wali Kota Manado. Selamat belajar.

(COK/ZAK/SYA/ETA/TAN/GSA)

[klik.kompas.id/padanginovasi](http://klik.kompas.id/padanginovasi)



|        |                                                                                                                                                             |         |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Pemulihan Lampung Selatan</b>                                                                                                                            | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Kompas (Halaman, 17)                                                                                                                                        |         |                        |
| Resume | Pemulihan sektor pariwisata di Lampung Selatan setelah tsunami Selat Sunda perlu dukungan dari pemerintah. Zona merah rawan bencana juga perlu diperhatikan |         |                        |

# Pemulihan Lampung Selatan

Pemulihan sektor pariwisata di Lampung Selatan setelah tsunami Selat Sunda perlu dukungan dari pemerintah. Zona merah rawan bencana juga perlu diperhatikan.

**BANDAR LAMPUNG, KOMPAS** — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya memulihkan sektor pariwisata setelah tsunami Selat Sunda menerjang Lampung Selatan akhir tahun lalu. Sektor pariwisata di kabupaten itu ditargetkan pulih dalam kurun waktu 3-6 bulan ke depan.

Kepala Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan Yuda Sukmarina, Minggu (13/1/2019), menjelaskan, pantai di Lampung Selatan yang hancur diterjang tsunami, di antaranya Pantai Wartawan, Belebuk, Minang Roa, dan Kedu Warna. Kemudian, terdapat tiga hotel dan penginapan yang rusak.

Sejumlah fasilitas, seperti *homestay*, warung dan kios kuliner, gazebo, perahu, mushala, serta toilet, juga rusak. Nilai kerugian sektor wisata akibat bencana tsunami diperkirakan mencapai Rp 8,5 miliar.

Menurut Yuda, para pelaku usaha perhotelan dan jasa wisata di Kalianda juga merugi. Hal ini karena banyak wisatawan yang membatalkan kunjungan setelah tsunami menerjang kawasan itu. "Biasanya hotel selalu penuh dengan wisatawan pada masa liburan pergantian tahun. Tahun ini, pelaku usaha perhotelan harus mengembalikan sebagian dana *booking fee* karena tamu tidak jadi menginap," katanya.

Pemkab berupaya segera memulihkan kembali sektor

wisata di Lampung Selatan diawali dengan mengkaji ulang sejumlah lokasi wisata di kawasan pesisir. Kajian itu akan dilakukan bersama pemerintah pusat.

"Sejumlah lokasi wisata di kawasan pesisir, misalnya di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, telah ditetapkan sebagai zona merah rawan bencana. Ke depan, lokasi tersebut harus dikosongkan dan tidak diperuntukkan bagi permukiman ataupun wisata. Kawasan itu akan dijadikan zona hijau," katanya.

## Wisata bahari

Selain penataan kawasan wisata, Pemkab berencana menggelar Festival Kalianda pada Juni 2019. Festival ini digelar untuk menarik kembali minat wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke Lampung Selatan.

Pemkab juga akan mengumpulkan pelaku jasa wisata dan kelompok sadar wisata di Lampung Selatan. Mereka akan diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pemulihan wisata agar gairah dan semangat menggaungkan wisata bahari kembali hidup.

Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Lampung Friandi Indrawan di Bandar Lampung, mengungkapkan, tingkat hunian hotel di Lampung menurun sekitar 20 persen setelah bencana tsunami Selat Sunda. Pelaku usaha perhotelan di Lampung

ditaksir kehilangan Rp 2 miliar karena banyak kamar yang kosong selama masa liburan akhir tahun.

Dia menilai, ke depan, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin pendirian lokasi wisata. Lokasi wisata harus dipastikan berada pada zona aman bencana. Pemulihan sektor pariwisata di Lampung Selatan juga harus memperhatikan status Gunung Anak Krakatau.

## Hunian sementara

Korban bencana tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan masih membutuhkan bantuan hunian sementara (huntara). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Lampung Selatan I Ketut Sukerta menuturkan, saat ini, sebagian warga masih bertahan di Gelanggang Olahraga Way Handak Kalianda. Sementara sebagian besar warga Pulau Sebesi memilih kembali ke pulau. Ada pula warga yang tinggal di rumah kerabatnya.

Dari 551 huntara yang dibutuhkan, sudah ada 56 huntara yang dibangun. Pembangunan huntara ini merupakan bantuan dari berbagai organisasi masyarakat.

Selain mengupayakan huntara bagi para korban bencana, Pemkab Lampung Selatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana relokasi permukiman warga. (VIO)



|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Pemda Akomodasi Pendataan Susulan</b>                                                                                                                                                                                                        | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Kompas (Halaman, 18)                                                                                                                                                                                                                            |         |                        |
| Resume | Meskipun data bencana tingkat Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota terus membuka kesempatan bagi penyintas menyusulkan data yang belum tercakup, baik anggota keluarganya yang tewas maupun rumahnya yang rusak |         |                        |

## PASCABENCANA SULTENG

# Pemda Akomodasi Pendataan Susulan

**PALU, KOMPAS** — Meskipun data bencana tingkat Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota terus membuka kesempatan bagi penyintas menyusulkan data yang belum tercakup, baik terkait anggota keluarganya yang tewas maupun rumahnya yang rusak. Hak penyintas harus jadi prioritas untuk dipecahkan.

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu Ibnu Mundzir di Palu, Sulteng, Minggu (13/1/2019), mengatakan, pendaftaran tetap mengikuti alur seperti sebelumnya, yakni melalui kelurahan. Waktu yang tersedia tak lagi panjang karena data itu harus segera diserahkan ke provinsi.

Namun, ia belum bisa menyebutkan, berapa lama pendaftaran tahap kedua dilayani. Hal itu karena data tahap pertama baru saja diumumkan agar dapat diketahui penyintas.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola menetapkan data bencana yang meliputi korban tewas dan hilang serta rumah rusak dan hilang. Korban tewas 2.657 orang dan hilang 667 jiwa. Korban terbanyak di Kota Palu 2.142 orang tewas dan 532 jiwa hilang. Sisanya tersebar di Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Untuk kerusakan rumah, putusan gubernur menyebutkan, total rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hilang 88.852 unit. Kerusakan masif

terjadi di Palu dengan total 42.864 rumah.

Data itu menjadi dasar untuk penyaluran santunan bagi korban tewas dan jumlah hunian tetap yang dibangun untuk penyintas yang direlokasi.

Gempa bumi berkekuatan M 7,4 mengguncang Donggala, Palu, dan Sigi pada 28 September 2018. Gempa disertai tsunami dan likuefaksi.

Bupati Sigi Irwan Lapatta menyatakan, pihaknya melalui kantor kelurahan atau desa tetap melayani pendaftaran bagi penyintas yang belum tercakup dalam daftar yang ditetapkan. Hak penyintas tetap menjadi prioritas.

Ismail Salahuddin (38), warga Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, heran karena dirinya bersama dengan tujuh tetangganya telah mendaftar di kantor kelurahan. Namun, begitu data tahap pertama diumumkan pada Jumat (11/1/2019), namanya dan tujuh tetangganya tak tercantum.

"Kami tidak tahu di mana tidak nyambungnya pendataan ini. Kami akan mendata lagi, tetapi harus ada kejelasan alur data mulai dari kelurahan," katanya.

Sekretaris Jenderal Pasigala Center (koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Palu, Sigi, dan Donggala) Mohammad Andhika mengingatkan, pemerintah harus terus mengakomodasi data kebencanaan. "Masalah administrasi tidak boleh mengesampingkan hak penyintas," ujarnya. (VDL)

|        |                                                              |         |                        |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | Langkah Awal Kota Cerdas                                     | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Kompas (Halaman, 19)                                         |         |                        |
| Resume | Mulai mengurangi sampah, kendati masih banyak pekerjaan lain |         |                        |

# Langkah Awal Kota Cerdas

Kota Tangerang Selatan melangkah menuju kota cerdas. Bersama komunitas, kota berusia 10 tahun ini mulai mengurangi sampah. Namun, masih banyak pekerjaan rumah lain.

**TANGERANG SELATAN, KOMPAS** — Warga Kota Tangerang Selatan, Banten, menilai pantas jika kotanya menyandang gelar kota metropolitan cerdas ketiga se-Indonesia. Meski begitu, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Tangerang Selatan mendapatkan penghargaan Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018 dari harian *Kompas*, Rabu (9/1/2019). Kota ini menjadi kota metropolitan paling cerdas ketiga se-Indonesia dengan skor 61,68 berdasarkan konsep Smart City Wheel yang diusulkan Boyd Cohen. Surabaya (Jawa Timur) dan Semarang (Jawa Tengah) berada di posisi pertama dan kedua.

Nilai tertinggi dalam penilaian Kota Tangerang Selatan ini didapat dari kreativitas masyarakat, yaitu 5,17.

Ditemui di Tangerang Selatan, Sabtu (12/1), Nuri (23), warga Pamulang, mengatakan, kotanya pantas disebut kota cerdas. Penilaian ini tumbuh dari pengetahuannya tentang anak-anak muda yang membuat berbagai inovasi teknologi.

"Kalau saya baca di media, sekarang banyak anak muda yang bikin inovasi di bidang teknologi, misalnya bikin robot dan kompor tenaga surya. Anak-anak muda ini yang bisa memotori berbagai inovasi untuk disalurkan ke generasi selanjutnya," kata Nuri yang sudah 20 tahun tinggal di Pamulang.

Meskipun demikian, Nuri merasa pelayanan publik perlu ditingkatkan. Ia mengaku masih kerepotan saat memperbarui kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di kantor kecamatan. Data Nuri sudah tercatat sejak 2012, tetapi proses pembuatan foto baru terlalu berbelit-belit.

## Nilai Tangerang Selatan Per Subdimensi IKCI 2018



Keterangan: Nilai semakin besar semakin bagus. Karena terdapat pengolahan dan pembobotan bertingkat, nilai dimensi tidak serta-merta didapatkan dari penjumlahan skor subdimensi.

Sumber: *Utang Kompas* dan *SWI*, data dari *Liputan 3D* 2018

Petugas di kantor Kecamatan Pamulang menyuruhnya mengirim pesan via WhatsApp ke akun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Cilenggang Serpong. Ia pun harus menunggu lama sampai KTP-el jadi. "Meskipun dari segi pendidikan sudah bagus, pelayanan publik perlu ditingkatkan," kata Nuri.

Nikko (31), pengojek daring yang tinggal di Jombang, Ciputat, baru dua tahun terakhir pindah dari Jakarta Timur ke Tangerang Selatan. Sebagai warga yang relatif baru, ia senang tinggal di kota berusia 10 tahun itu. Infrastruktur kota, seperti perumahan dan jalan, dinilai bagus meski masih banyak ruas jalan yang ber-



lubang saat musim hujan.

Namun, Nikko mengeluhkan angkutan kota yang tidak diatur baik. Di beberapa stasiun kereta, seperti Stasiun Sudimara yang jalannya tidak lebar, angkot sering kali *ngeterem* sehingga menimbulkan kemacetan.

Selainnya, Hata (41), pedagang di Pasar Modern BSD, mengatakan, Tangerang Selatan belum pantas disebut kota



cerdas. Kota cerdas seharusnya didukung koneksi internet di seluruh kota dan sistem transportasi yang lebih baik. "Kalau mau disebut kota cerdas, saya rasa belum. Seharusnya di mana-mana ada Wi-Fi supaya bisa *stay connected*. Terus transportasi publiknya belum sampai menjangkau ke dalam area permukiman," kata Hata yang sudah berdagang di situ selama 10 tahun.

Meski demikian, Hata mengapresiasi kualitas hidup yang baik. Sebab, rumah dan tempatnya berdagang di kompleks BSD City tergolong dekat serta relatif aman.

## Membangun partisipasi

Tangerang Selatan memiliki

aplikasi pengaduan masyarakat, yaitu *Mobile SIARAN* (Sistem Pelaporan dan Penguasaan).

Saat ditanyakan soal aplikasi ini, baik Nuri, Nikko, maupun Hata, belum mengetahui adanya *Mobile SIARAN*. Mereka menyatakan akan mencoba.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sepakat bahwa partisipasi masyarakat menjadi keunggulan kota dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa berdasarkan kartu kependudukan dan 1,5 juta jiwa sesuai data Badan Pusat Statistik itu.

Dari partisipasi masyarakat ini, kata Airin, kaum muda banyak berperan membangun lingkungan melalui organisasi

Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lain di tingkat RT/RW. "Luar biasa bentuk partisipasi anak muda selama tujuh tahun saya memimpin kota ini," kata Airin usai Pemberian Penghargaan IKCI di Kantor Harian *Kompas*, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

## Bank sampah

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah penanganan sampah. Anak muda ini membangun bank sampah untuk mengatasi kebersihan di RT/RW masing-masing.

"Sebagai fasilitator, komunitas sampah menginginkan kami (pemkot) membuat semacam 'Bank Indonesia' untuk bank sampah karena selama ini para pengepul sering bermain dengan harga. Mereka akhirnya memiliki kontrol harga di tingkat pengepul," kata Airin.

Dari inisiatif ini hadir komunitas bank sampah serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R). TPS3R setidaknya mengatasi masalah pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA Cipeucang Serpong.

Adalah Komunitas LabTanya, komunitas anak muda yang ikut menata Kota Tangerang Selatan. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2015 ini berkolaborasi dengan Kelompok Kolektif Kurator serta menggandeng dan merangkul komunitas di RT dan RW.

Pendiri Komunitas LabTanya, Adi Wibowo, mengatakan, mereka memiliki program Kota Tanpa Sampah dan memulainya dengan Rumah Minim Sampah. Program ini mengajak warga untuk mengumpulkan beragam pengetahuan mengenai sampah dan upaya mengurangi sampah. (PIN/Exo)



|        |                                                                                                                |         |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | 6 Ruas Siap Dilelang                                                                                           | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 3)                                                                                 |         |                        |
| Resume | Panjang enam ruas tol ini mencapai 391,73 KM dan diperkirakan akan menelan investasi sebesar Rp 131,73 triliun |         |                        |

## ► PEMBANGUNAN JALAN TOL

# 6 Ruas Siap Dilelang

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membuka lelang investasi enam ruas tol yang diprakarsai badan usaha. Panjang enam ruas ini mencapai 391,73 kilometer dan diperkirakan menelan investasi sebesar Rp131,2 triliun.

Ruas jalan tol prakarsa yang akan dilelang tahun ini yaitu Semanan — Balaraja (31,9 kilometer), Kamal—Teluk Naga—Rajeg (38,6 kilometer), dan Akses Pelabuhan Patimban (37,7 kilometer).

Selanjutnya Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (184 kilometer), Jembatan Tol Balikpapan—Penajam (7,6 kilometer), Solo—Yogyakarta—Kulonprogo (91,93 kilometer).

Dalam catatan *Bisnis*, lima ruas prakarsa sudah diperkenalkan dalam penajakan minat pasar atau market sounding pada Juli 2018 lalu.

Adapun ruas, yaitu Solo—Yogyakarta—Kulonprogo baru mendapat izin prakarsa setelah penajakan minat pasar digelar.

Eka Pria Anas, Kepala Panitia Pelelangan Perusahaan Jalan Tol BPJT, mengatakan badan usaha tengah melakukan perbaikan pada sejumlah dokumen perencanaan jalan tol. "Kami usahakan [lelang] pada tahun ini semua. Prinsipnya sudah dapat lelang," ujarnya kepada *Bisnis*, Jumat (11/1).

Sesuai aturan main yang berlaku,

badan usaha yang menjadi pemrakarsa ruas tol baru tetap diharuskan mengikuti lelang investasi. Namun, inisiator memiliki hak istimewa, yaitu hak menyamakan penawaran. Dengan kata lain, peluang memenangkan lelang amat besar.

Di enam ruas prakarsa yang akan dilelang, BUMN dan perusahaan swasta turut bekerja sama. Di ruas Semanan—Balaraja, misalnya, PT Delta Mega Persada berkongsi dengan PT PP (Persero) Tbk.

Kongsi pelat merah dan pelat kuning juga terjadi di ruas Akses Patimban dan Solo—Yogyakarta—Kulonprogo. Bahkan, di ruas Akses Patimban, perusahaan asing Toyota Shuzo Corporation berpeluang menanam modal.

Presiden Direktur PT Surya Sementa Internusa Tbk. Johanes Suriadjaja mengatakan keterlibatan Toyota membuka peluang pendanaan dari Japan International Cooperation Agency. Namun di sisi lain, kepemilikan saham masing-masing anggota konsorsium akan berkurang.

Surya Internusa merupakan anggota konsorsium dengan porsi saham 25%. Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menjadi pemimpin dengan porsi 55%. Adapun, sisa saham dimiliki PT Jasa Sarana dan PT Daya Mulia Turangga masing-masing 10%. *(Rivki Maulana)*

|        |                                                                                                                                                                              |         |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Pengembalian LMAN Capai 84,36%</b>                                                                                                                                        | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 7)                                                                                                                                               |         |                        |
| Resume | Lembaga Manajemen Aset Negara telah merealisasikan pembayaran dana talangan proyek strategis jalan nasional tol kepada badan usaha sebesar 84,36% dari tagihan yang diajukan |         |                        |

## ► DANA TALANGAN LAHAN TOL

# Pengembalian LMAN Capai 84,36%

JAKARTA — Lembaga Manajemen Aset Negara telah merealisasikan pembayaran dana talangan proyek strategis nasional jalan tol kepada badan usaha sebesar 84,36% dari tagihan yang diajukan.

Krisna P. Kinanti  
krisna.putri@bisnis.com

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembayaran dana talangan proyek strategis nasional (PSN) jalan tol sebesar Rp30,59 triliun atau telah terealisasi 84,36% dari tagihan.

Nominal tersebut berasal dari dua alokasi tahun anggaran. Untuk alokasi tahun anggaran 2016, tagihan yang diajukan kepada LMAN adalah Rp13,81 triliun dan telah dibayar sebesar Rp13,49 triliun.

Adapun, untuk sisanya masih terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan tanah jalan tol serta permasalahan tanah karakteristik khusus seperti tanah kas desa dan tanah Perum Perhutani.

"Untuk PSN jalan tol tahun anggaran 2017, tagihan yang telah diajukan ke LMAN adalah sebesar Rp22,45 triliun dan telah dilakukan realisasi [pembayaran] Rp17,10 triliun," tuturnya kepada *Bisnis*, Jumat (11/1).

Untuk sisanya, masih terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh PPK pengadaan tanah jalan tol serta permasalahan tanah karakteristik khusus seperti tanah wakaf.

Dalam kurun waktu 2 minggu awal Januari 2019, LMAN telah melakukan pembayaran langsung senilai Rp105 miliar untuk 278 bidang.

Pembayaran langsung tersebut dilakukan atas empat PSN yaitu jalur kereta api Bandara Adi Soemarmo—Stasiun

Solo Balapan sebesar Rp35,54 miliar untuk 91 bidang, jalur kereta api Solo Balapan—Kedung Banteng sebesar Rp4,97 miliar untuk 30 bidang, Bendungan Ciawi Rp53,035 miliar untuk 85 bidang, dan Bendungan Keureuto Rp11,85 miliar untuk 72 bidang.

Sampai dengan 11 Januari 2019, LMAN telah melakukan pembayaran langsung dan dana talangan sebesar Rp33,10 triliun untuk empat sektor PSN yaitu jalan tol, bendungan, kereta api, dan pelabuhan.

Di sisi lain, badan usaha diharapkan percepatan pengembalian dan dari pembayaran dana talangan untuk efisiensi aliran kas perseroan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidianto mengatakan bahwa sejak skema tersebut diterapkan pada 2015, perusahaan sudah menalangi dana talangan pembatasan lahan sebesar Rp13 triliun sampai akhir November 2018.

"Dari jumlah itu, total yang belum kembali ada Rp5,90 triliun. Kami berharap bisa segera cair," ujarnya, beberapa waktu lalu.

### NAIK SIGNIFIKAN

Realisasi pembayaran dana talangan proyek jalan tol PSN hingga bulan ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan realisasi hingga awal Desember 2018.

Berdasarkan data LMAN yang didapat *Bisnis* per 7 Desember 2018, jumlah pembayaran yang sudah dilakukan LMAN mencapai 74,51% dari total tagihan Rp17,35 triliun. Dari sisa tagihan yang belum dibayarkan, sebanyak Rp1,36 triliun tengah diteliti LMAN.

Selain itu, terdapat total tagihan Rp1,06 triliun yang dokumennya harus dikembalikan. Dari jumlah itu, sebanyak Rp3,047 triliun dokumen harus dilengkapi kembali oleh PPK, sisanya merupakan tanah khusus dan tanah yang tengah dalam proses konfirmasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) plus retur.

Ketika itu, Rahayu mengatakan bahwa secara total, pembayaran dana talangan terbesar dilakukan di proyek tol di Ja-



bodetabek Rp7,06 triliun, disusul proyek tol di Kalimantan dan Sulawesi Rp2,27 triliun, Trans-Jawa Rp1,84 triliun dan Trans-Sumatra Rp1,75 triliun.

Bila dilihat dari persentase pembayaran dari total alokasi, pembayaran dana talangan untuk proyek jalan tol Trans-Jawa merupakan yang tertinggi sebesar 70,46% dari total alokasi, disusul proyek jalan tol di Jabodetabek 51,56%, jalan tol Trans-Sumatra 48,69% dan proyek sejenis di Kalimantan dan Sulawesi 47,72%.

"Dari jumlah itu, total sudah ada 15.537 bidang tanah terbebaskan," kata Rahayu. (*Bisnis*, 12 Des. 2018)

Adapun, usulan verifikasi kepada BPKP untuk dokumen yang sudah lengkap sampai saat itu untuk pembayaran dana talangan Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp26,97 triliun.

Sementara itu, untuk pembayaran dana talangan TA 2016, LMAN sudah melakukan pembayaran sebesar Rp13,44 triliun atau 84% dari total alokasi Rp16 triliun.

Pembayaran tersebut mencapai 97,45% dari total tagihan kepada LMAN Rp13,56 triliun. LMAN juga sudah membayar pembayaran bunga untuk 2016.

Kebijakan dana talangan pembebasan lahan proyek infrastruktur, khususnya jalan tol dan bendungan merupakan ide pemerintah sejak 2016 untuk mempercepat pembangunan proyek karena keterbatasan dana, terutama untuk membebaskan lahan.

Melalui kebijakan tersebut, badan usaha membebaskan lahan menggunakan dana sendiri dan kemudian dibayar kembali oleh LMAN melalui dana APBN.

Karena pengembaliannya sangat bergantung pada APBN, sedangkan di sisi lain kas badan usaha terkuras, pemerintah pun berencana menerapkan skema pembayaran langsung.

Hal itu diharapkan dapat mempercepat pengusahaan ketersediaan lahan dan lebih efisien karena tidak adanya penambahan nilai bunga dari dana badan usaha yang terpakai.

Kepala Badan Pengatur Jalan (BPJT) Tol Herry Triaputna Zuna pernah mengemukakan bahwa BPJT bersama pemangku kepentingan terkait, terus mencari penyempurnaan skema pembebasan lahan yang paling efisien untuk diterapkan.

Beberapa hal yang masih jadi persoalan selain masalah dana talangan yaitu

adanya selisih antara besarnya bunga yang akan dikembalikan oleh negara kepada badan usaha sebesar BI Repo Rate dan besaran bunga komersial yang ditanggung badan usaha.

Pasalnya, mayoritas badan usaha mengandalkan pinjaman pihak ketiga, seperti dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menalangi pengadaan lahan tol.

Herry mengatakan bahwa pihaknya mengawatkan pinjaman pembayaran untuk dana talangan dapat dilakukan antara pemberi pinjaman, dalam hal ini BUMN, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan LMAN, yang berkewajiban membayar dana talangan.

Dengan begitu, nantinya bukan badan usaha yang mencari pinjaman, melainkan langsung mendekatkan pemberi pinjaman dan LMAN sehingga efisiensi dapat tercapai.

"Karena kalau mau dilihat dari potret jauh, sebenarnya yang saling pinjam itu SMI dan LMAN. Nah, jadi kenapa harus memutar panjang? Ini sudah kami usulkan, tetapi tentu ini perlu proses panjang," jelasnya, beberapa waktu lalu. (*Business*)

► Sampai dengan 11 Januari 2019, LMAN telah melakukan pembayaran langsung dan dana talangan Rp33,10 triliun untuk empat sektor PSN.

► Badan usaha mengharapkan percepatan pengembalian dan dari pembayaran dana talangan untuk efisiensi aliran kas perseroan.



|        |                                                                                                                                                   |         |                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Bendungan Bedo Rampung Akhir Tahun Ini</b>                                                                                                     | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 17)                                                                                                                   |         |                        |
| Resume | Bendungan Bendo yang berlokasi di Ponorogo memiliki tinggi 17 M, lebar puncak 15 M dan panjang 332 M itu ditargetkan selesai pada akhir tahun ini |         |                        |

## ► SUMBER DAYA AIR

# Bendungan Bendo Rampung Akhir Tahun Ini

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan Bendungan Bendo selesai akhir tahun ini.

Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa Bendungan Bendo yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur memiliki tinggi 71 meter, lebar puncak mencapai 15 meter, dan panjang 332 meter.

Pembangunannya dilaksanakan oleh tiga BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk., PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya.

“Rencananya akhir tahun 2019, rampung langsung *impounding* [pengisian air],” tuturnya kepada *Bisnis*, Jumat (11/1).

Bendungan Bendo memiliki kapasitas tampung air sebesar 43 juta meter kubik, lebih besar dari kapasitas Bendungan Raknamo di Nusa Tenggara Timur sebanyak 14 juta meter kubik dan Bendungan Tukul yang hanya 9 juta meter kubik.

Selain irigasi, Bendungan Bendo juga bermanfaat untuk pengendalian banjir di Kota Ponorogo dan Kabupaten Madiun yang membendung Sungai Keyang yang merupakan anak Sungai Bengawan Madiun.

Bendungan Bendo juga mampu menyediakan air baku sebesar 780

liter per detik untuk domestik dan industri serta menjadi pembangkit listrik sebesar 4 MW.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis pembangunan Bendungan Bendo yang terletak di Kali Ngindeng bakal rampung pada akhir tahun ini.

“Ini baru selesai 77% [pembangunannya]. Akhir tahun [2019] kurang lebih [selesai],” katanya, belum lama ini.

Menurut Presiden, pemerintah sedang membangun cukup banyak bendungan di Jawa Timur antara lain Bendungan Bendo, Tukul, Tugu, Bagong, Semantok, dan Gongseng.

“Banyak sekali dibangun di Jawa Timur karena memang diperlukan sebagai lumbung pangan Indonesia,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR bakal melelang kontrak pembangunan sembilan bendungan sepanjang tahun ini.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan bahwa lelang proyek pembangunan bendungan merupakan bagian dari program pembangunan 65 bendungan dalam periode 2015—2019.

“Beberapa yang akan dilelang, Pelosika, Riam Kiwa, di Papua juga ada. Yang mana dulu [proyek yang dilelang] tergantung kesiapannya,” ujarnya, pekan lalu. *(Krizia P. Kinanti)*

|        |                                                                                                                  |         |                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Inkindo Ingin Remunerasi Minimal Merata</b>                                                                   | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 17)                                                                                  |         |                        |
| Resume | Kalangan konsultan mendesak penerapan remunerasi minimal pada jasa konsultasi di seluruh instansi pemilik proyek |         |                        |

## ► JASA KONSULTANSI

# Inkindo Ingin Remunerasi Minimal Merata

JAKARTA — Kalangan konsultan mendesak penerapan remunerasi minimal pada jasa konsultasi konstruksi pada seluruh instansi pemilik proyek.

Pasalnya, penerapan remunerasi minimal merupakan amanah dari Undang-Undang No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan bahwa saat ini pengaturan remunerasi (*billing rate*) baru diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat.

Padahal, pekerjaan konsultasi konstruksi tidak hanya berada di lingkungan Kementerian PUPR, tetapi juga di instansi lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami ingin agar *billing rate* tidak hanya berlaku di PUPR. Ini kan mengacu UU Jasa Konstruksi, seharusnya seluruh Indonesia diterapkan. *Billing rate* [Kementerian] Perhubungan dan Depdagri ya, harus mengacu [pada UU Jasa Konstruksi] dong, seperti di PUPR," ujarnya kepada *Bisnis*, Jumat (11/1).

Di Kementerian PUPR, remunerasi minimal bagi tenaga konsultan konstruksi diatur dalam Keputusan Menteri PUPR

No. 897/KPTS/M/2017. Remunerasi minimal dalam beleid ini ditetapkan Rp18 juta sampai dengan Rp77 juta sesuai dengan masa pengalaman, jenjang, dan strata kependidikan.

Remunerasi tenaga konsultan konstruksi di DKI Jakarta menjadi acuan dengan indeks 1.

Sementara itu, besaran remunerasi di luar DKI akan dikalikan dengan indeks standar remunerasi minimal per provinsi. Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat tercatat memiliki indeks di atas 1. Dengan kata lain, remunerasi di lima provinsi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Peter menjelaskan bahwa penerapan remunerasi minimal akan membuat iklim industri jasa konsultasi menjadi sehat karena mencegah praktik perang tarif di kalangan penyedia jasa.

Selain itu, remunerasi minimal juga menjadi stimulus bagi lulusan perguruan tinggi untuk berkecimpung di industri ini.

Di sisi lain, Inkindo juga mendorong penerbitan peraturan Presiden yang bisa menjadi payung hukum bagi jasa konsultasi nonkonstruksi.

Frans menyebutkan bahwa saat ini jasa konsultasi nonkonstruksi tidak memiliki payung hukum.

"Kami perlu *legal standing* untuk [konsultasi] nonkonstruksi. Pak JK [Wakil Presiden Jusuf Kalla] juga sudah minta Bappenas mengakomodasi [aspirasi Inkindo]," jelas Frans.

Ketika menerima pengurus DPN Inkindo pada Jumat (11/1), Wakil Presiden Jusuf Kalla berpesan agar perusahaan penyedia jasa konsultasi yang tergabung dalam Inkindo untuk selalu menjaga kepercayaan terhadap hasil pekerjaan.

"Kehadiran konsultan itu untuk menjamin pekerjaan atau proyek itu berjalan dengan baik, efisien dari segi waktu dan dana, serta berkualitas," kata Wapres seperti dikutip dari *Antara*.

Kalla mengatakan bahwa tanpa kejujuran dan kepercayaan sulit bagi penyedia jasa konsultasi menjalankan fungsinya. Misalnya, sebagai konsultan pengawas jangan justru mengikuti pada kemauan kontraktor atau pemilik proyek.

Konsultan, kata Wapres, dituntut untuk memiliki independensi dan ketegasan dalam menjalankan tugas mereka. (*Rivki Maulana*)



|        |                                                                                                                                                       |         |                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | <b>Sudahi Petaka Di Lintas Sumatra</b>                                                                                                                | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 8)                                                                                                                        |         |                        |
| Resume | Lalu lintas truk pengangkut batu bara meninggalkan cerita kelam. Pergerakan orang dan barang tersendat, criminal meningkat dan ratusan nyawa melayang |         |                        |

## ➤ ANGKUTAN BATU BARA

# Sudahi Petaka di Lintas Sumatra

Lalu lintas truk batu bara di jalan lintas Sumatra Selatan meninggalkan cerita kelam. Pergerakan orang dan barang tersendat, kriminalitas meningkat, dan ratusan nyawa melayang. Siapa menanggung dosa?

Surya Mahendra Saputra  
surya.mahendra@bisnis.com

**T**ubuh Aldi Yulian terkapar tak bernyawa di tepi jalan lintas Tanjung Enim-Rutiraja. Jenasahnya diturapi sebelah daun pisang. Remaja berusia 17 tahun itu tewas menegrikan dengan kondisi kepala menuk terindas dan slomp truk batu bara yang telah melarikan diri.

Kecelakaan maut itu terjadi tidak jauh dari rumah mendung di Desa Keban Agung, dekat Rumah Makan Mandaling, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Rabu (1/8/2018) sekitar pukul 06.45. Jalur lintas Tanjung Enim memang berisiko pada pagi hari karena banyak truk batu bara yang melaju kencang tanpa muatan setelah semalaman bepergian.

Aldi semestinya menamatkan sekolah menengah atas tahun depan dan berencana melanjutkan kuliah di Jawa. Tapi mimpi itu mati seketika di atas aspal jalan lintas Sumatra, menyisakan seragam putih abu-abu yang berlarut darah.

Selain Aldi, kemandangan pun pernah mendera Parlan dan kewanja. Warga Desa Panang Jaya, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim itu harus merelakan kepingan Nurlika Sari, putrinya yang masih berusia 3 tahun. Nurlika dilabrak truk batu bara dan meninggal dalam perjalanan menuju RSUD H.M. Rabin Muara Enim.

"Kami minta nian jangan ada lagi truk batu bara lewat jalan umum. Lah [sudah] banyak korban. Anak kami jadi korban," ujar Parlan terdengar gemas.

Truk batu bara telah merenggut banyak nyawa di jalan lintas Sumatra Selatan, utamanya di Muara Enim dan Lahat. Jumlahnya meningkat tiap tahun. Berdasarkan data Surlantas

➤ Lalu lintas truk batu bara di jalan lintas Sumatra Selatan telah merenggut banyak nyawa, utamanya di Muara Enim dan Lahat.

➤ Jalan khusus angkutan batu bara yang sudah siap dilalui adalah jalan khusus angkutan batubara Titan.

Polres Muara Enim, jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun lalu mencapai 2.097 kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 388 orang.

Sementara itu, dari data Surlantas Polres Lahat, angka kecelakaan lalu lintas per September 2018 telah mencapai 61 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 49 orang. Jumlah itu meningkat dari tahun lalu yang mencapai 58 kasus dengan 48 orang meninggal dunia.

Kasat Lantas Polres Lahat AKP Dini Prasetya mengakui tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh banyaknya jalan yang rusak akibat lalu lintas truk batu bara yang kelebihan dimensi dan angkutan. "Sangat berisiko karena truk berukuran besar berbagi jalan dengan pengendara lain," katanya.

Di samping risiko kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, lalu lintas truk batu bara juga meningkatkan angka kriminalitas. Pesampakan dengan kekerasan hingga pemukulan truk batu bara oleh warga kerap terjadi di wilayah Lahat dan Muara Enim.

Sejak 2005, semula pemberian IUP oleh bupati di Sumatra Selatan membuat batu bara menjadi komoditas yang seksi bagi swasta. Terlebih, perat Bumi Sriwijaya diseski 18,15 miliar ton atau 60% dari cadangan batu bara nasional dengan kandungan kalori antara 4.800-5.400 Kcal/kg. Saban hari batu bara digali dan dibawa keluar dari Sumatra Selatan. Bukan hanya melalui kereta api, juga ribuan truk, dan ratusan tongkang.

Sebagian besar warga merasa tidak aman dan nyaman berlalu-lalang di jalan lintas Sumat. Kevasan itu sebenarnya tidak perlu berdampak dengan semangat Sumatra Selatan mewujudkan kampanye "Sumat Lumbang Energi, Sumat Lumbang Pangan" andalkan sedari awal komitmen kebijakan jalan khusus angkutan batubara dijalankan secara konsisten.

## JALAN KHUSUS

Seungguhnya, petaka ini bukan tanpa solusi. Sudah ada inisiasi jalan khusus batu bara yang dibangun PT Servo Lintas Raya antara Lahat-Tanjung Api-Api sejak 2011. Pada 2014, PT Titan Infra Energy mengukusi PT Servo Lintas Raya



dan PT Swarna Dajwa Dermaga Jaya untuk mengambil alih pengerjaan dan operasional jalan Servo. Titan pun memanfaatkan jalan khusus itu untuk kepentingan angkutan batu bara perusahaan secara mandiri.

Jalan tersebut berada di Desa Tanjung Jambu yang merupakan lambung batu bara di Kabupaten Lahat hingga Pelabuhan Muara Enim sepanjang 116 kilometer. Pengusaha dan transporter batu bara bakal lebih mudah membawa hasil bumi tersebut jika menggunakan jalan khusus tanpa menemu masyarakat pengguna jalan umum.

Selesai dilantik pada 1 Oktober 2018, Gubernur Sumat Herman Deru bergas menjawab aspirasi warga Sumat, utamanya Muara Enim dan Lahat. Pemprov Sumat resmi menatap akses angkutan batu bara melalui jalan umum elektrik per 8 November 2018. Kebijakan itu dipertegas setelah Pemprov Sumat mencabut Pergub Nomor 23/2013.

Sekretaris Daerah Sumat Nasran Umar mengatakan setelah pencabutan regulasi itu maka aturan terkait angkutan batubara kembali ke Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengangkutan batu bara melalui jalan khusus.

Kepala Dinas ESDM Sumat Robert

Beri mengatakan jalan khusus angkutan batu bara yang sudah siap dilalui adalah Jalan Servo yang saat ini dikelola Titan. "Tentu lebih cepat dan efisien, kalau angkutan lewat jalan umum dari Lahat ke Palembang bisa satu malam. Kalau pakai jalan khusus hanya 5 jam sampai 6 jam dan tiba di pelabuhan," katanya.

Selain itu, dia melanjutkan, transporter juga bisa melintasi jalan khusus 24 jam penuh berbeda halnya jika melewati jalan umum yang diatur hanya saat malam hari.

Selain jalan khusus itu, pengusaha juga dapat mengantar emas hitam menggunakan angkutan khusus kereta api yang saat ini memiliki tiga tempat untuk loading batu bara. Tempat pertama berada di Tanjung Enim menuju titik jalur kereta api di Muara Enim untuk selanjutnya diangkut ke pelabuhan. Tempat kedua berada di Soka Cinta, Lahat, dan langsung menuju ke pelabuhan. Ada pula titik di Banjar Sari, Lahat.

"Selingga [jalan umum] dari Muara Enim sampai ke Palembang tidak ada lagi angkutan batu bara, selanjutnya semua tambang dari Lahat ke Muara Enim melewati tiga titik berikut jalan khusus Servo."

Robert menjamin biaya angkutan kereta api maupun jalan khusus Servo tidak lebih mahal ketimbang

mengangkut batu bara melalui jalan umum.

Hingga kini, PT Titan Infra Energy melalui anak usahanya PT Swarnadajwa Dermaga Jaya dan PT Servo Lintas Raya telah menyepakati kerja sama dengan sebas pemegang IUP Operasi Produksi dan dua pemegang IUP Operasi Produksi Khusus. Swarnadajwa Dermaga Jaya merupakan salah satu anak perusahaan Titan yang mengantongi izin operasional terminal khusus pertambangan batu baratan Servo Lintas Raya mengantongi izin pertambangan khusus pengangkutan dan penjualan yang memiliki hauling road sebagai penunjang kegiatan usaha.

Selanjut, Direktur Commercial PT Titan Infra Energy mengatakan kerja sama dengan sembilan perusahaan pemegang IUP OP dan dua perusahaan pemegang IUP OPH tersebut mencakup pengangkutan 15 juta metrik ton batu bara per tahun. "Di luar PT Bukit Asam Tbk., volume itu setara dengan 75% dari total produksi batu bara di Muara Enim dan Lahat," jelasnya.

Gagasan pelayanan angkutan batu bara di jalan khusus mendapatkan dukungan dari Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan sejumlah anggota DPRD Muara Enim. Senang itu jalan seluas dengan aspirasi masyarakat.

Mewakili masyarakat Kabupaten Muara Enim, Ahmad Yani menyampaikan rasa syukur dan terima kasih untuk dukungan yang diberikan oleh Pemprov Sumat. "Karena kebijakan itu, sekarang perjalanan dari Palembang ke Muara Enim dan sebaliknya bisa ditempuh dalam kondisi nyaman dan lancar."

Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Muara Enim, Kamis (22/11), Bupati dan DPRD Muara Enim meminta pengusaha batubara di Kabupaten Lahat dan Muara Enim mengalihkan semua angkutan menggunakan jalan umum ke angkutan kereta api atau jalan khusus.

Kebijakan itu pun diungkapkan berkesinambungan. Tidak perlu ada lagi kompromi di jalan umum. Jangan ada lagi toleransi. Tenta saja, yang paling penting ialah konsistensinya, menyudahi petaka bertahun-tahun di jalan lintas Sumatra.

## Profil IUP Sumsel

| Kabupaten/Kota     | Jumlah Perusahaan |
|--------------------|-------------------|
| Provinsi           | 19                |
| Muara Enim         | 15                |
| Ogan Komering Ulu  | 9                 |
| Lahat              | 27                |
| Ogan Komering Ilir | 4                 |
| OKU Timur          | 3                 |
| Musi Banyuasin     | 32                |
| Ogan Ilir          | 1                 |
| Empat Lawang       | 1                 |
| OKU Selatan        | 3                 |
| Prabumulih         | 4                 |
| Musi Rawas         | 4                 |
| Muaratara          | 8                 |
| Banyuasin          | 8                 |
| PAL1               | 3                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>141</b>        |

Sumber: Dinas ESDM Sumat, 2017



|        |                                |         |                        |
|--------|--------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | Utamakan Jalan Khusus          | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 8) |         |                        |
| Resume | Untuk angkutan berat batu bara |         |                        |

► DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT BUDI SETIYADI

# Utamakan Jalan Khusus

**PALEMBANG —** Pro dan kontra mengenai kebijakan Pemprov Sumsel melarang akses angkutan batu bara di jalan umum. Pengusaha diminta untuk menggunakan jalan khusus angkutan batubara Tikan yang dioperasikan oleh PT Tikan Infra Energy. Apa dan bagaimana sikap Kementerian Perhubungan atas kebijakan tersebut. Bisnis mewawancarai Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, belum lama ini. Berikut petikannya.

**Mengapa sulit sekali mencapai konsistensi untuk memindahkan angkutan batu bara dari jalan negara ke jalan khusus?**

Kalau kita kembali ke aturan dan khususnya untuk kepentingan umum, jelas yang kita utamakan adalah menggunakan jalan khusus, bukan menggunakan jalan negara yang sudah ada. Nah kalau kemudian kemarin-

kemarin itu belum ada jalan khusus, mungkin ada kebijakan penggunaan jalan negara tapi statusnya kan hanya sementara.

Persoalannya kan diberikan toleransi terus untuk menggunakan jalan negara. Tidak terjadi semacam sistem yang baik berkaitan dengan jalan khusus tadi. Padahal sudah ada jalan khusus yang dibangun oleh salah satu perusahaan.

Kemudian, banyak truk yang belum bisa masuk ke sana dengan berbagai macam alasan. Apakah mungkin skemanya A ke B antara perusahaan A dan operator jalan tapi belum ketemu kesepakatan? Bisa jadi tidak terjadi kesepakatan sehingga terus digunakan jalan negara kan. Dan itu diperpanjang terus oleh gubernur yang lama. Tidak boleh itu sebenarnya karena itu jalan negara untuk kepentingan yang lebih banyak lagi, jadi harus gunakan jalan khusus.

**Jadi bagaimana membangun komitmen penggunaan jalan khusus?**

Mungkin dengan dasar kepentingan masyarakat yang lebih besar, ketertarikan, tingkat polisi, aspek keselamatan tidak terjamin, peraturan lagi yang sekarang untuk memaksa menggunakan lagi jalan khusus itu. Kemudian itu kan sudah keluar Pengub sehingga jalan negara mulai dari Matra Enim sampai Palembang kan tidak dipakai lagi sekarang, mereka menggunakan jalan khusus tadi.

Kemudian dengan dasar itu, pihak perusahaan (RUP OP) tenggang. Mereka terlanjur kontrak dengan mitra di luar negeri, mungkin harus dapatkan hasil sekian ton dan sebagainya. Saya waktu rapat pertama kali masih mengumpulkan masalah. Tanya sanasini. Rencananya, Sabtu

(8/12) ada rapat kembali dipimpin Pak Menteri untuk mengurai persoalan ini.

Kita concern terhadap penerapan jalan khusus ini. Selain penerapan jalan khusus, Menteri Perhubungan juga sedang mendorong penggunaan jasa angkut dengan kereta api. Namun, kalau kereta api mungkin bukan saya yang berikan masukan. Selagi itu sedang didorong, semuanya kembali ke jalan khusus dulu.

**Apa yang ingin dicapai dalam rapat tersebut? Apakah bisa menghasilkan keputusan final?**

Belum. Mungkin arahanya keputusan final yang akan diambil Menteri sambil menunggu kereta api, sambil menunggu jalan khusus mungkin ada proses bisnis yang baik dengan pihak yang menggunakan. Atau mungkin juga ada peraturan menteri yang akan kami bekukan.

**Apa poin penting dalam beleid tersebut?**

Nanti kebijakan menteri itu, Pasti memberikan tenggat waktu, toleransi waktu kepada perusahaan itu untuk melakukan kegiatan, beberapa jalan masih bisa dipakai. Nanti saya siapkan peraturannya, ruas jalan mana yang mereka belum siapkan nanti dikasih toleransi 3 bulan. Biasanya kan mereka tidak bergerak begitu dikasih toleransi. Kemudian untuk pembebasan lahan [jalan khusus] tidak terjadi, tidak ada kemandirian [barang]. Itu akan kami evaluasi.

**Masalah ini sudah berlarut-larut, langkah seperti apa yang sebetulnya bisa merealisasikan penggunaan jalan khusus ini?**

Bolanya ada di gubernur. Saya tidak tahu gubernur yang lama karena masalahnya tidak

diampaikan ke menteri. Tapi gubernur yang sekarang sudah melaporkannya dan kami langsung menggelar rapat.

Kalau soal sanksi untuk yang melanggar dalam permenhub ada nanti. Harapannya nanti regulasinya lebih kuat ya untuk dukung penerapan jalan khusus.

**Penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara apakah terjadi juga di daerah tambang lain, selain Sumsel?**

Kalau di Kalimantan dulu juga terjadi tapi mereka cepat karena mungkin ketersediaan tanah di sana lebih banyak jadi mereka cepat cari jalan keluar atau solusinya, buat jalan khusus tadi. Sekarang di Kalimantan semua menggunakan jalan khusus, tidak menggunakan jalan negara lagi.

Persembahkan: Dinda Mulandari



|        |                                                                                               |         |                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | Jalan Tol Patimban Bisa Dibiayai JICA                                                         | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 8)                                                                |         |                        |
| Resume | Konsorsium yang menjadi pemrakarsa jalan tol akses Patimban melancir peluang pendanaan proyek |         |                        |

## ► AKSES PELABUHAN

# Jalan Tol Patimban Bisa Dibiayai JICA

JAKARTA — Konsorsium yang menjadi pemrakarsa jalan tol akses Patimban melancir peluang pendanaan proyek dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Proyek jalan tol ini direncanakan dilelang pada tahun ini setelah sempat diperkenalkan pada Juli 2018 lalu.

Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk. Johannes Suriadaja mengatakan, pendanaan dari JICA bakal mengucur jika Toyota Shuzo Corporation bergabung di konsorsium.

Emiten berkode saham SSIA tersebut merupakan anggota konsorsium dengan porsi saham 25%. Sementara itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menjadi pemimpin dengan porsi 55%. Adapun, sisa saham dimiliki PT Jasa Sarana dan PT Daya Mulia Turangga masing-masing 10%.

"Mereka *enggak* masalah kalau Toyota mau masuk dan kalau JICA dapat membiayai proyek tersebut," jelas Johannes kepada *Bisnis*, Kamis (9/1).

Dia menambahkan, partisipasi Toyota di konsorsium bakal mengurus porsi saham semua anggota konsorsium. Kendati demikian, hingga saat ini porsi saham yang dikurangi untuk setiap anggota belum ditentukan karena pembahasan masih terus bergulir.

Direktur Pengembangan Jasa Marga Adrian Priohutomo mengatakan bahwa perseroan berkeinginan untuk tetap menjadi pemimpin konsorsium dengan porsi mayoritas.

Dia mengimbuhkan, pendanaan dari Jepang dalam bentuk fasilitas Private Sector Investment Finance (PSIF) akan memperkuat pendanaan proyek yang mana memenuhi porsi 70% dari nilai

investasi.

Jalan tol akses Patimban bakal menelan biaya hingga Rp6,36 triliun. Dengan kata lain, JICA berpotensi untuk memenuhi kebutuhan investasi sebesar Rp4,45 triliun.

Adapun, jalan tol akses Patimban bakal terhubung langsung dengan jalan tol Cikopo—Palimanan atau Cipali. Jalan tol sepanjang 37,7 kilometer ini akan menjadi akses utama ke Pelabuhan Patimban, pelabuhan yang juga didanai oleh JICA. Pembangunan tahap pertama Pelabuhan Patimban ditargetkan rampung pada Desember 2019.

Hingga saat ini, proyek jalan tol akses Patimban tengah dalam persiapan lelang. Konsorsium sebelumnya telah memperoleh izin prakarsa atau rencana pembangunan jalan tol ini. Persetujuan tertuang dalam SK Menteri PUPR No.JL.03.04-Mn/1214 tanggal 2 November 2017. Kendati sudah mengantongi izin prakarsa, konsorsium tetap diharuskan mengikuti lelang. Namun, sebagai pemrakarsa, konsorsium mendapatkan keistimewaan, salah satunya *right to match* atau hak menyamakan penawaran.

Di sisi lain, partisipasi Surya Internusa merupakan bagian rencana pengembangan kawasan industri di Subang. Johannes menyebutkan bahwa kawasan industri Subang bakal dirilis tahun ini.

Hingga November 2018, Surya Internusa telah mengakuisisi lahan seluas 1.038 hektare. Adapun, izin pengembangan kawasan industri yang diperoleh perseroan mencapai 2.000 hektare. (Rivki Maulana)

|        |                                                                                                                                       |         |                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| Judul  | Berita Foto                                                                                                                           | Tanggal | Senin, 14 Januari 2019 |
| Media  | Bisnis Indonesia, (Halaman, 8)                                                                                                        |         |                        |
| Resume | Menteri Pertanian menyerahkan bantuan 96 unit mesin tetas kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya |         |                        |

#### PROGRAM BEDAH KEMISKINAN



**Menteri Pertanian** Anurag Kumar (kanan) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Dwi Rachman (kiri) meninjau langsung program bedah kemiskinan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BERSERAJA) di Desa Manjajung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (11/1). Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan hampir 600 ekor ayam kampung petelur unggas dalam Program BERSERAJA yang diberikan kepada 1.000 rumah tangga miskin (RTM) dan menyerahkan bantuan 96 unit mesin tetas kepada 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.